



Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir  
Pusat Riset Kelautan  
Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

# LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2020



Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  
Jl. Raya Padang-Painan Ktf.16 Bungus Padang Sumatera Barat



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunianya-Nya Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2020. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, September 2020

Kepala Loka



**Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S NIP.**  
**19790401 200502 2 001**



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	v
Ikhtisar Eksekutif .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Keragaan SDM .....	5
1.4 Sistematika Laporan .....	8
<b>II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>10</b>
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	10
2.2 Sasaran Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2020 .....	11
2.3 Penetapan Kinerja Tahun 2020 .....	14
<b>III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
3.1 Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020 .....	16
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan III Tahun 2020 .....	18
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	20
3.4 Akuntabilitas Keuangan .....	39
<b>IV. PENUTUP</b>	<b>45</b>
4.1. Permasalahan .....	46
4.2. Kesimpulan.....	46

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Strategis LRSDKP tahun 2020 Revisi.....	12
Tabel 2.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP 2020 Revisi.....	13
Tabel 3.	Penetapan Kinerja LRSDKP 2020 Revisi.....	14
Tabel 4.	Capaian Kinerja pada masing-masing IKU TW II T.A 2020.....	17
Tabel 5.	Tingkat Validasi IKU .....	18
Tabel 6.	Nilai Indeks Capaian NPSS .....	18
Tabel 7.	Klasifikasi dan Status NPSS .....	19
Tabel 8.	Capaian Kinerja LRSDKP TW II, tahun 2020.....	20
Tabel 9.	Capaian IKU 1 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	22
Tabel 10.	Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	23
Tabel 11.	Capaian IKU 3 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	24
Tabel 12.	Capaian IKU 4 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	25
Tabel 13.	Capaian IKU 5 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	26
Tabel 14.	Capaian IKU 6 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	27
Tabel 15.	Judul KTI LRSDKP yang telah terbit Triwulan II tahun 2020 .....	28
Tabel 16.	Capaian IKU 7 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	30
Tabel 17.	Capaian IKU 8 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	32
Tabel 18.	Capaian IKU 9 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	33
Tabel 19.	Capaian IKU 10 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	38
Tabel 20.	Capaian IKU 11 LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	39
Tabel 21.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2020.....	41
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I dan II tahun 2020.....	42
Tabel 23.	Realisasi berdasarkan jenis belanja LRSDKP Triwulan I dan II tahun 2020..	43
Tabel 24.	Realisasi keuangan persumber dana LRSDKP Triwulan II tahun 2020 .....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ....	3
Gambar 2.	Sebaran Pegawai lingkup LRSDKP (PNS dan Tenaga Kontrak).....	6
Gambar 3.	Sebaran tingkat pendidikan PNS lingkup LRSDKP.....	6
Gambar 4.	Sebaran tingkat pendidikan Tenaga Kontrak lingkup LRSDKP.....	7
Gambar 5.	Sebaran Pegawai Lingkup LRSDKP berdasar jabatan fungsional ....	7
Gambar 6.	Peta Strategi LRSDKP 2020 .....	12
Gambar 7.	Peta Strategi hasil pengukuran TW II Tahun 2020 .....	19
Gambar 8.	NPSS Hasil capaian Kinerja LRSDKP dalam Aplikasi Kinerjaku 2020 ....	20
Gambar 9.	Komposisi Anggaran DIPA LRSDKP T.A 2020 .....	41
Gambar 10.	Perbandingan target dan realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2020...	41

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2020 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2020. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2020 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2020 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menetapkan 2 Sasaran Strategis yang diuraikan menjadi 11 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2020 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*.

Hasil pengukuran capaian kinerja *Eksternal* LRSDKP yang menggunakan aplikasi **Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK)**, NPSS LRSDKP tahun 2020 menggunakan metode pengukuran eksternal adalah sebesar 112,50% yang berasal dari masing-masing level dibawahnya adalah sebagai berikut :

- a. Level Tata Usaha, capaian kinerja sebesar 103,13%;
- b. Tata Operasional, capaian kinerja sebesar 106,25%;
- c. Pelayanan Teknis, capaian kinerja sebesar 115.94%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2020 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,50% dengan status baik (warna hijau) pada pengukuran menggunakan metode *Eksternal*.



Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban secara tertulis sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



# I. PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan tingkat kinerja yang dicapai LRSDKP serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja LRSDKP guna memperbaiki kinerjanya dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Triwulan II tahun 2020 ini disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dasar pelaksanaan kegiatan LRSDKP tahun 2019, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Indikator Kinerja Utama LRSDKP tahun 2020, Rencana Strategis (Renstra) LRSDKP 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan (RKT) LRSDKP tahun 2020, Penetapan Kinerja (PK) Kepala LRSDKP, berbagai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) LRSDKP dan PPK lingkup LRSDKP.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LRSDKP sebagai salah satu Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja mempunyai kewajiban untuk :

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; dan
2. Menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan kepada Pimpinan Unit Organisasi (Eselon I).

### **TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP. LRSDKP dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Struktur sebagai berikut :

a. Urusan Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana.

b. Subseksi Tata Operasional

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.

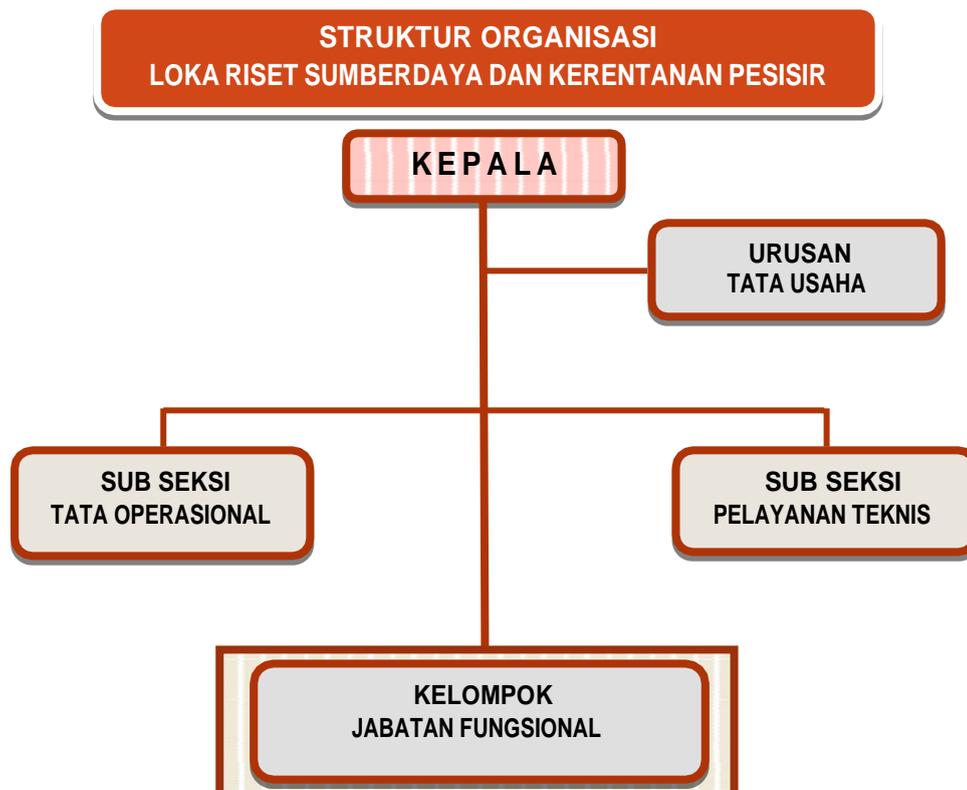
c. Subseksi Pelayanan Teknis

Mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi, kerja sama, pengelolaan prasarana dan sarana penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir, serta perpustakaan.

d. Kelompok jabatan fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik; dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, adalah sebagaimana struktur organisasi berikut :



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas **Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelaksanaan penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
- c. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- d. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

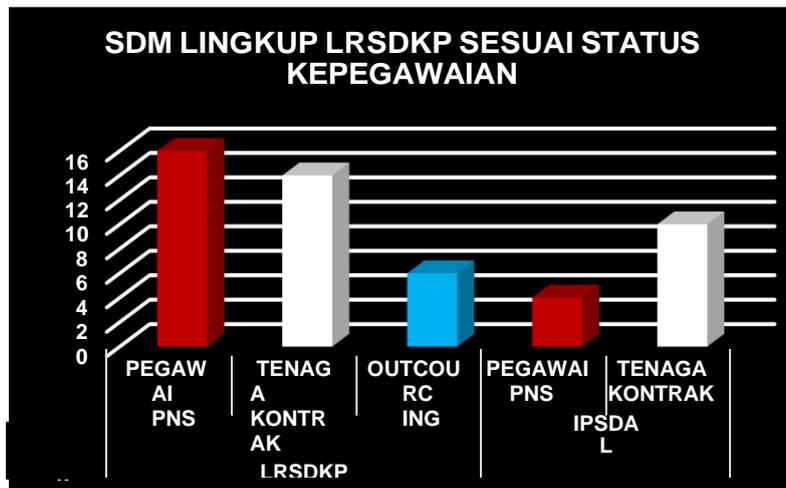
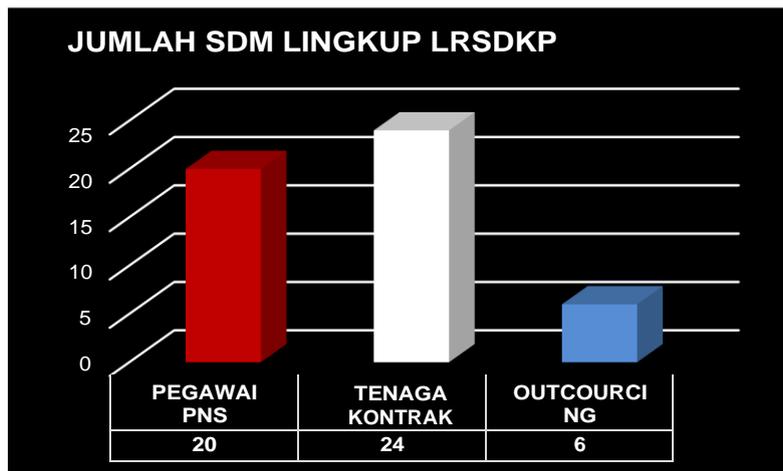
Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

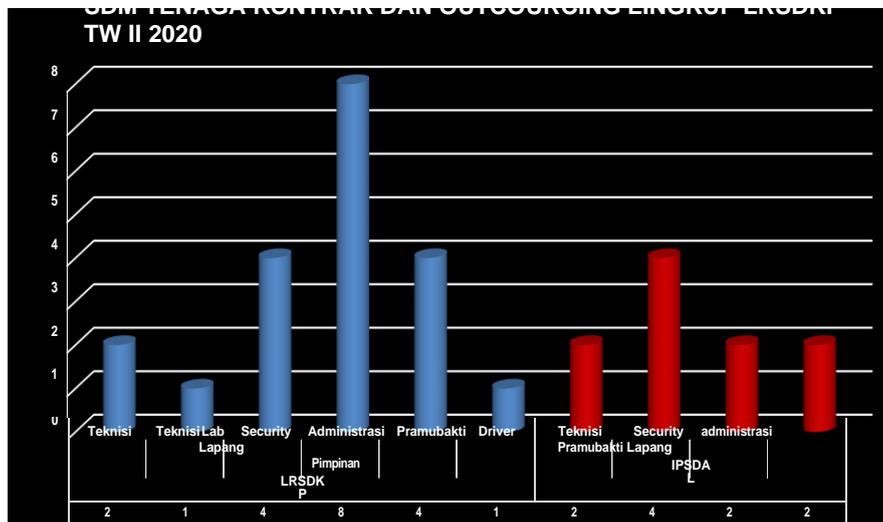
1. Menyelenggarakan penelitian penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir di bidang karakteristik, potensi sumber daya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik;
2. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;
3. Menyelenggaraakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
4. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
5. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan

- Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

### 1.3. KERAGAAN SDM LRSDKP

Pegawai Lingkup Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) pada Triwulan II tahun 2020 berjumlah 51 orang, 36 orang di kantor LRSDKP Bungus dan 15 Orang di kantor IPSDAL madura. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada Triwulan II tahun 2020.





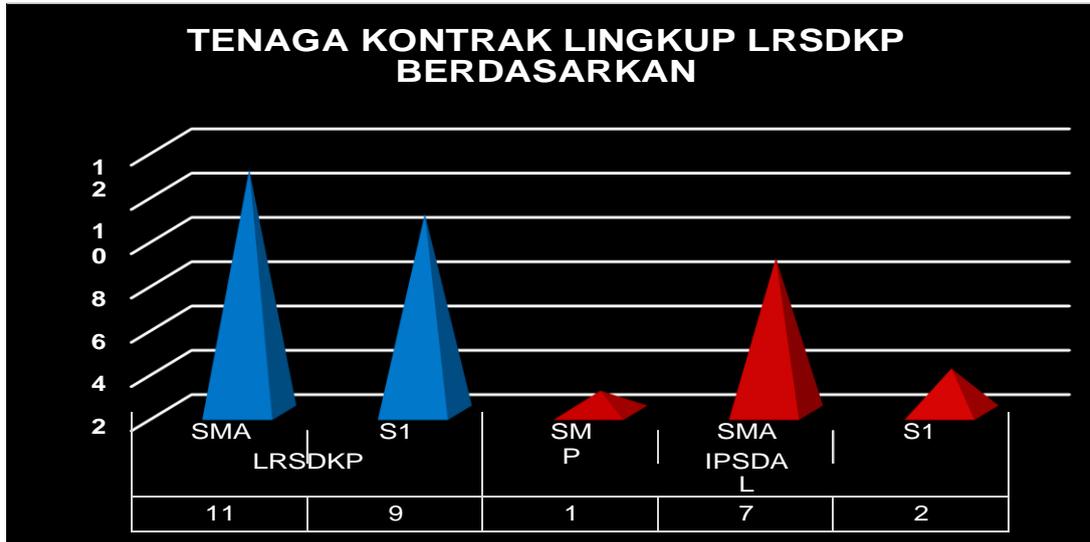
**Gambar 2.** Sebaran Pegawai LRSDKP (PNS dan Tenaga Kontrak) pada Triwulan II tahun 2020

Jumlah PNS lingkup LRSDKP pada Triwulan II tahun 2020 sebanyak 20 orang, tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2019. Sedangkan untuk tenaga kontrak berjumlah 31 orang (20 orang di kantor LRSDKP dan 11 orang di kantor IPSAL madura), tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Sementara untuk sebaran pegawai Lingkup LRSDKP pada triwulan II tahun 2020 menurut tingkat pendidikan tersaji sebagai berikut :



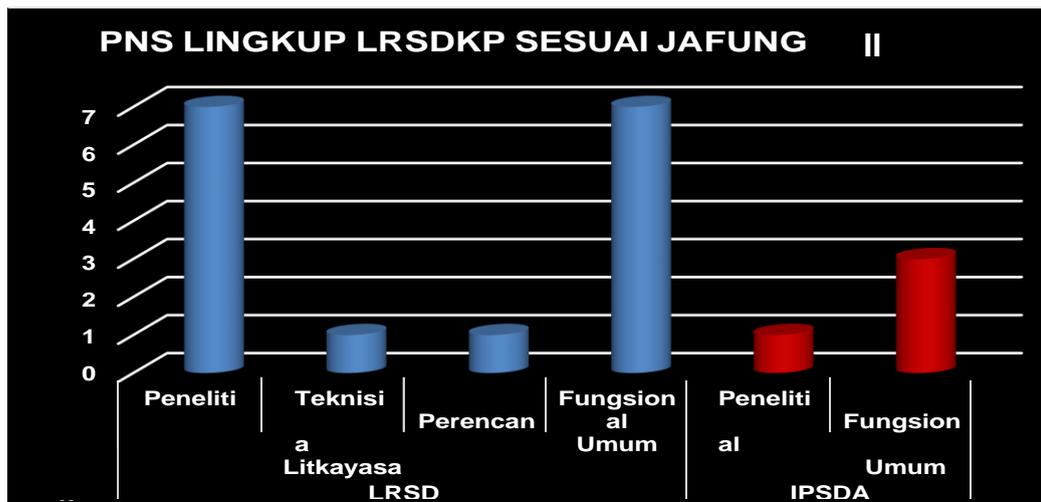
**Gambar 3.** Sebaran Tingkat pendidikan PNS lingkup LRSDKP pada triwulan II tahun 2020



*Gambar 4.* Sebaran Tingkat pendidikan pegawai kontrak lingkup LRSDKP pada triwulan II tahun 2020

Keragaan PNS Lingkup LRSDKP Triwulan II tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2019, dan dalam rangka peningkatan kapasitas serta kualitas sumberdaya manusia, 2 orang peneliti Loka riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir masih dalam pelaksanaan tugas belajar S2 di Institut Pertanian Bogor dan di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.

Sedangkan sebaran jabatan fungsional di lingkup LRSDKP sampai dengan Triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :



*Gambar 5.* Sebaran Pegawai Lingkup LRSDKP berdasarkan jabatan fungsional pada Triwulan II tahun 2020

Keragaan Jabatan Fungsional PNS Lingkup LRSDKP Triwulan II tahun 2020 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2019.

#### 1.4 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Dasar haluan yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja LRSDKP :

- a) Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b) PP Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Laporan Kinerja.

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja LRSDKP sampai dengan Triwulan II tahun 2020, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) terhadap rencana kinerja (performance plans) Triwulan II tahun 2020. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capain kinerja dan kendala selama Triwulan II tahun 2020
2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan tentang Rencana Strategis LRSDKP 2020, dan Penetapan kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2020.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada Triwulan II tahun 2020, serta membandingkannya dengan tahun lalu;



5. **Bab IV Penutup**, menyajikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2020; dan
6. **Lampiran-lampiran :**
  - a. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2020
  - b. Implementasi Rencana Aksi Triwulan II tahun 2020
  - c. Form Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan II tahun 2020 menggunakan metode Eksternal.

## II. PERENCANAAN *dan* PERJANJIAN KINERJA

### RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ke-3 yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan serta ***mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan.***

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020-2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020-2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

#### A. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL).

Pusat Riset Kelautan menetapkan visi yaitu “Center of Excellence (Pusat Kepakaran) riset dan inovasi kelautan untuk mendukung visi misi BRSDM KP dan KKP” .

Berdasarkan visi Pusriskel tersebut, maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah “Institusi Penelitian yang Handal dalam Menghasilkan IPTEK Menuju Negara Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar”.

### B. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mediseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

### C. Tujuan

Tujuan LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
2. Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
4. Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

## SASARAN STRATEGIS DAN RENCANA KERJA TRIWULAN II TAHUN 2020

Peta strategi merupakan suatu *dashboard* (panel instrumen) yang memetakan Sasaran Strategis (SS) kedalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi LRSDKP. Peta strategi memudahkan LRSDKP untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan LRSDKP. Peta strategi LRSDKP Triwulan II tahun 2020 yang disepakati antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel ditunjukkan dalam Gambar berikut :



*Gambar 6.* Peta Strategi LRSDKP tahun 2020 Revisi

Peta strategi LRSDKP menampilkan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi *Balanced Scorecard* (BSC), setiap Sasaran Strategis (SS) berdasarkan tujuan yang akan dicapai.

Adapun penjabaran dari perspektif Peta Strategi LRSDKP dituangkan dalam indikator kinerja dan targetnya sesuai Tabel 1 sebagai berikut.

*Tabel 1.* Rencana Strategis LRSDKP tahun 2020 Revisi

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dimanfaatkan	1	Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)	3
		2	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)	1
		3	Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)	1
		4	Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarannya (Lokasi)	2
		5	Jejarings dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	2

		6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan	7	Indeks profesionalitas ASN Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	72
		8	Persentase unit kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82
		9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Nilai)	Baik (88)
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibandingkan realisasi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir TA. 2019 (Persen)	1
		11	Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)	85

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan awal yang merepresentasikan rencana dan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimilikinya. Rencana kerja LRSDKP Triwulan II tahun 2020 ditampilkan pada Tabel 2 berikut :

*Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP Tahun 2020 Revisi*

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dimanfaatkan	1	Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)	3
		2	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)	1
		3	Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)	1
		4	Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarannya (Lokasi)	2
		5	Jejaring dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	2

		6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan	7	Indeks profesionalitas ASN Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	72
		8	Persentase unit kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82
		9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Nilai)	Baik (88)
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibandingkan realisasi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir TA. 2019 (Persen)	1
		11	Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)	85

### PENETAPAN KINERJA 2020

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel

Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 (Dua) sasaran strategis (SS) yang harus dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU LRSDKP tahun 2020 untuk semua SS berjumlah 11 IKU. Penetapan Kinerja LRSDKP tahun 2020 tersaji pada Tabel 3 berikut :

*Tabel 3. Penetapan Kinerja LRSDKP Tahun 2020 Revisi*

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dimanfaatkan	1	Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)	3
		2	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)	1
		3	Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)	1

		4	Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)	2
		5	Jejaringdan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti(Dokumen)	2
		6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset SumberDaya dan KerentananPesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	10
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan	7	Indeks profesionalitas ASN Loka Riset Sumber Daya dan KerentananPesisir (Indeks)	72
		8	Persentase unit kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82
		9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka RisetSumberDayadan Kerentanan Pesisir (Nilai)	Baik (88)
		10	Batastertinggipersentase nilaitemuan LHP BPK atas LK Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibandingkanrealisasi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir TA. 2019(Persen)	1
		11	Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)	85

Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja LRSDKP tahun 2020 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel. Perjanjian kerja ini memuat sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target. IKU tersebut merupakan salah satu dukungan program penelitian dan pengembangan lptek kelautan dan perikanan tahun 2020. Pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai IKU-IKU tersebut LRSDKP menerima alokasi anggaran awal sebesar Rp. 11.338.610.000,-, pada bulan april terjadi pemotongan anggaran untuk penanggulangan pandemi covid 19 sehingga pagu anggaran LRSDKP setelah revisi adalah Rp. 6.886.590.000,- yang bersumber dari APBN.

### III. AKUNTABILITAS KINERJA

Penerapan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja LRSDKP telah lama dilakukan, meskipun dalam prakteknya belum sepenuhnya mengakomodir prinsip - prinsip BSC, namun hal tersebut tetap dilanjutkan dalam rangka memastikan target - target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pencapaian Visi dan Misi LRSDKP dilakukan melalui penetapan 3 Sasaran Strategis (SS) yang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja LRSDKP tahun 2020. Dengan menerapkan metode BSC sebagai alat manajemen kinerja, maka nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS), nilai pencapaian inisiatif strategis (NPIS) dan nilai kinerja keseluruhan (NKK) Tapja APBN tahun 2020 dari 2 Sasaran Strategis (SS) dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat lebih akuntabel.

#### CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2020

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2020 dapat tercapai.

Capaian Kinerja Utama (IKU) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Triwulan II tahun 2020 mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada *Balanced Score Card* (BSC). Capaian indikator kinerja utama pada masing - masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan II tahun 2020 adalah sebagai berikut (Tabel 5) :

**Tabel 4.** Capaian Kinerja pada masing-masing IKU Triwulan II tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Triwulan II tahun 2020			
			T	R	%	
1	Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dimanfaatkan	1	Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)	-	-	-
		2	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)	-	-	-
		3	Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)	-	-	-
		4	Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarannya (Lokasi)	1	1	100
		5	Jejaring dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	-	-	-
		6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	4	9	225
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan	7	Indeks profesionalitas ASN Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	-	-	-
		8	Persentase unit kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	70	100	142
		9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Nilai)	-	-	-
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibandingkan realisasi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir TA. 2019 (Persen)	-	-	-
		11	Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)	-	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 4 terdapat 3 IKU yang sudah ada nilai capaiannya dan lebih besar/sama dengan targetnya, yakni IKU 4, IKU 6, IKU 8. Sedangkan 8 IKU belum tercapai karena perhitungannya diakhir tahun yakni IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 5, IKU 7, IKU 9, IKU 10 dan IKU 11.

## HASIL PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2020

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis. Pengukuran capaian kinerja mengacu pada teknik pengukuran berdasarkan Balance Score card yaitu Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS);

### Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 10%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti Tabel 5 berikut :

*Tabel 5. Tingkat Validasi IKU*

No	Validasi IKU	Bobot
1	Lead Input	0,1
2	Lead Proses	0,2
3	Lag Output	0,3
4	Lag Outcome	0,4

Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut (Tabel 6) :

*Tabel 6. Nilai Indeks Capaian NPSS*

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian $\geq 100\%$	$100\% >$ Indeks Capaian $\geq 90\%$	Indeks Capaian $< 90\%$

Dalam melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut (Tabel 7).

**Tabel 7. Klasifikasi dan Status NPSS**

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 10%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
$X < 90\%$	$X > 90\%$	$X < 90\%$ atau $X < 90\%$	Buruk
$100\% > X \geq 90\%$	$100\% < X \leq 90\%$	-	Sedang
$X \geq 100\%$	$X \leq 100\%$	$X = 100\%$	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja juga harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : *Maximize* adalah kondisi dimana semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Minimize* adalah kondisi dimana semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; *Stabilize* adalah kondisi dimana semakin stabil (tidak naik dan turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP pada Triwulan II tahun 2020 menggunakan metode/tools pengukuran yang menggunakan aplikasi [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id). berikut nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Triwulan II tahun 2020 menggunakan aplikasi kinerjaku terdapat pada (Gambar 7),

TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
109.23%	112.50%	+   📊	+   📊
110.00%	103.13%	+   📊	+   📊
108.78%	106.25%	+   📊	+   📊
103.60%	115.94%	+   📊	+   📊

**Gambar 7. Peta strategis hasil Pencapaian Kinerja LRSDKP dalam Aplikasi Kinerjaku Triwulan II tahun 2020.**

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Loka Riset Sumberdaya dan kerentanan pesisir yang menggunakan aplikasi [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id) Triwulan II tahun 2020 (gambar 7) terlihat capaian kinerja berwarna hijau yang menunjukkan bahwa realisasi telah mencapai atau melebihi target ( $\geq 100\%$ )

No	Nama Unit Kerja	TW1		TW2		TW3		TW4		Cascading
		NPSS	RUPIAH	NPSS	RUPIAH	NPSS	RUPIAH	NPSS	RUPIAH	
1	LOKA RISET SUMBERDAYA DAN KERENTANAN PESISIR, PADANG	109.23	896.880	112.50	896.880					Q
2	URUSAN TATA USAHA	110.00		103.13						Q
3	SUB SEKSI TATA OPERASIONAL	108.78		106.25						Q
4	SUB SEKSI PELAYANAN TEKNIS	103.60		115.94						Q

**Gambar 8.** NPSS Hasil Pencapaian Kinerja LRSDKP dalam Aplikasi Kinerjaku Triwulan II tahun 2020.

NPSS LRSDKP Triwulan II tahun 2020 (Gambar 8) menggunakan metode pengukuran eksternal adalah sebesar 112,50% berasal dari capaian kinerja masing-masing level dibawahnya adalah sebagai berikut :

- Level Tata Usaha, capaian kinerja sebesar 103,13%;
- Tata Operasional, capaian kinerja sebesar 106,25%;
- Pelayanan Teknis, capaian kinerja sebesar 115.94%.

## EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

**Tabel 8.** Capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		Triwulan II tahun 2020		
				T	R	%
1	Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dimanfaatkan	1	Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)	-	-	-
		2	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)	-	-	-

		3	Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)	.	.	.
		4	Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarannya (Lokasi)	1	1	100
		5	Jejaring dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)	.	.	.
		6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	4	9	225
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan	7	Indeks profesionalitas ASN Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	.	.	.
		8	Persentase unit kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	70	100	142
		9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Nilai)	.	.	.
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dibandingkan realisasi anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir TA. 2019 (Persen)	.	.	.
		11	Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)	.	.	.

Capaian kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berasal dari 3 kontribusi sasaran strategis berikut :

## SASARAN STRATEGIS 1

### *Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan*

Nilai capaian sasaran strategis Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan pada triwulan II sebesar 162,5%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 6 (enam) IKU yaitu :

### INDIKATOR KINERJA UTAMA 1

***Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)***

IKU ini didefinisikan sebagai Data dan Informasi Sumberdaya Pesisir yang dihasilkan dari kegiatan penelitian **“Identifikasi Situs Kapal Tenggelam di “Jalur Rempah, Pemodelan Distribusi Sampah Dan Lingkungan Laut Untuk Mendukung Penilaian Kesehatan Laut (Ocean Health Index) Di Teluk Manado dan Sekitarnya, Identifikasi Kerentanan/Kebencanaan Pesisir untuk Pengembangan Teknologi Perlindungan Pantai”** yang dilaksanakan pada tahun 2020, Target jumlah Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan adalah 3 (paket/buah) dalam 1 tahun anggaran, Dengan rincian waktu pencapaian adalah 11 bulan pencapaian lapangan dan 1 bulan terakhir untuk pelaporan.

Bukti Capaian pada IKU ini adalah sebagai berikut :

Resume/naskah dari kegiatan riset data informasi dan rekomendasi

Kegiatan riset data informasi berupa peta/ gambar, infografis, tabel terkait :

- a. Data kelautan; data potensi/ produksi/ luasan budi daya/ parameter lingkungan dan kewilayahan
- b. Informasi kelautan; peta fishing ground/ distribusi perikanan/ daya dukung perairan/ daya dukung lahan budi daya/ kerentanan pesisir/
- c. Rekomendasi : kebijakan pengelolaan SDKP

**Tabel 9.** Capaian IKU 1 LRS DKP Triwulan II tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<b>Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)</b>		
- Target	-	-
- Realisasi	-	-
- Persentase (%)	-	-

IKU 1 Pada Triwulan II tahun 2020, belum tercapai karena kegiatan riset ditargetkan selesai pada akhir tahun yakni bulan November - desember 2020.

Capaian IKU 1 pada triwulan II tahun 2020 masih sama jika dibandingkan dengan capaian triwulan I yakni belum ada capaian karena atau nol karena IKU ini baru akan terealisasi pada akhir tahun 2020.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

### ***Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)***

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah Desa/Kawasan yang menerapkan atau memanfaatkan iptek hasil riset inovasi kelautan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6/2014)

inovasi adalah cara-cara baru atau teknologi baru yang digunakan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat agar berdaya guna dan berhasil guna.

Desa inovasi kelautan yang memanfaatkan teknologi, inovasi dan atau rekomendasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat KP Terdiseminaskannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset BRSDMKP kepada stakeholder di desa

*Tabel 10. Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan II tahun 2020*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)</i>		
- Target	Tidak ada IKU ini	-
- Realisasi	Tidak ada IKU ini	-
- Persentase (%)	Tidak ada IKU ini	-

Capaian IKU 2 Triwulan II tahun 2020 adalah 0 atau belum tercapai karena IKU ini ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2020 mengingat kegiatan TAL yang dilaksanakan Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir baru selesai pada akhir tahun anggaran. Keberhasilan pencapaian IKU sangat erat kaitannya dengan proses kegiatan TAL yang dilaksanakan oleh Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir.

Nilai Capaian IKU 2 pada Triwulan II tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan capaian triwulan I karena IKU ini baru masuk pada Triwulan II.

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA 3**

#### ***Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)***

IKU ini didefinisikan sebagai alat hasil riset inovasi kelautan yang diadopsi masyarakat pada lokasi tertentu untuk menerima umpan balik dari masyarakat dalam rangka pengembangan alat tersebut agar lebih tepat guna, IKU ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pemecahan masalah-masalah konkrit dalam pengolahan Garam. Kegiatan TAL ini merupakan salah satu program prioritas Nasional untuk tahun 2020.

Teknologi Adaptif Lokasi Riset Kelautan merupakan Bukti capaian Akhir dari IKU ini adalah sebagai berikut :

1. BAST Penggunaan Alat Hasil Riset Inovasi Teknologi Kelautan antara masyarakat dengan KKP.

*Tabel 11. Capaian IKU 3 LRSDKP Triwulan II tahun 2020*

<b>Indikator Kinerja Utama (IKU)</b>	<b>Triwulan I tahun 2020</b>	<b>Triwulan II tahun 2020</b>
<i>Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)</i>		
- Target	-	-
- Realisasi	-	-
- Persentase (%)	-	-

Capaian IKU 3 Triwulan II tahun 2020 adalah 0 atau belum tercapai karena IKU ini ditargetkan tercapai pada akhir tahun 2020 mengingat kegiatan Riset yang dilaksanakan Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir baru selesai pada akhir tahun anggaran. Keberhasilan pencapaian IKU sangat erat kaitannya dengan proses kegiatan Riset yang dilaksanakan oleh Loka Riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir.

Nilai Capaian IKU 3 pada Triwulan II tahun 2020 masih sama dengan capaian triwulan I yakni nol, IKU ini ditargetkan tercapai pada akhir tahun anggaran 2020.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

### ***Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)***

IKU ini didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas sarana dan prasarana yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup LRS DKP. Target pada tahun 2020 adalah 2 lokasi yakni LRS DKP padang dan IPSAL Madura, Sarana dan Prasarana tersebut berupa Pengadaan Peralatan dan Mesin dan Pengadaan Fasilitas Riset, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 533.000.000,-.

*Tabel 12. Capaian IKU 4 LRS DKP Triwulan II tahun 2020*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi)</i>		
- Target	-	1
- Realisasi	-	1
- Persentase (%)	-	100

Dari Tabel 12 terlihat bahwa pada Triwulan II IKU 4 sudah tercapai sesuai dengan target triwulan II yakni target 1 capaian 1 atau 100%, berupa Alat Pengolah Data Instalasi Pamekasan (Sony 55 Inch Android TV 4K UHD KO-55X8000G 1 unit) dan Belanja Modal Mebelair Instalasi Pamekasan (Kursi Ruang Rapat 100 unit).

Nilai Capaian IKU 4 Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (Lokasi) pada Triwulan II tahun 2020 lebih besar jika dibandingkan dengan capaian Kinerja Triwulan I yakni 100% pada triwulan II dan 0% pada triwulan I.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 5

### ***Jejaring dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)***

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama yang dijalin oleh satuan kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang difasilitasi oleh Sekretariat BRSDM pada tahun yang masih berjalan dan terbentuk di tahun 2020.

## DEFINISI

1. Jumlah jejaring, kemitraan dan/ atau kerja sama riset dan sdm kelautan dan perikanan
2. Jejaring adalah jalinan asosiasi/forum/ organisasi lainnya yang memiliki kesamaan profesi/kepakaran yang diikuti oleh Satker/ UPT lingkup Pusat Riset Kelautan
3. Kemitraan adalah hubungan dengan badan/ perorangan untuk melakukan aktivitas bersama dan/atau memiliki perjanjian kerja sama(sedang berjalan/on going).
4. Kerja sama riset Kelautan adalah penyelenggaraan kerja sama antara Pusat Riset Kelautan dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:
  - a. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek;
  - b. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan
  - c. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian;
  - d. Perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan hasil litbang;
  - e. Diseminasi dan publikasi; Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama;
  - f. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Jejaring kerjasama yang dihasilkan bisa juga berasal dari usulan inisiasi kerjasama stakeholder yang dikoordinasikan/disetujui oleh BRSDM

Target yang dicanangkan pada tahun 2020 untuk pencapaian IKU ini adalah 2 (dua) buah usulan jejaring dan kerjasama litbang di bidang Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir.

*Tabel 13. Capaian IKU 5 LRS DKP Triwulan II tahun 2020*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Jejaring dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen)</i>		
- Target	-	-
- Realisasi	-	-
- Persentase (%)	-	-

Pada Triwulan II tahun 2020 IKU kerjasama ini belum terealisasi, masih pada proses penjajagan kerjasama.

Nilai Capaian IKU 4 pada Triwulan II tahun 2020 capaiannya masih sama jika dibandingkan dengan capaian Kinerja pada triwulan I yakni masih nol atau belum ada capaian karena IKU Jejaring dan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakati dan ditindaklanjuti (Dokumen) ditargetkan baru terealisasi diakhir tahun 2020.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 6

### ***Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)***

IKU ini didefinisikan sebagai tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan di jurnal terakreditasi atau prosiding dalam dan/atau luar negeri pada tahun berjalan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti di LRSDKP. Pada tahun 2020, target karya tulis ilmiah yang ditetapkan awalnya adalah 19 buah KTI, kemudian ada perubahan sehingga target KTI LRSDKP menjadi 10 buah KTI.

*Tabel 14. Capaian IKU 6 LRSDKP Triwulan II tahun 2020*

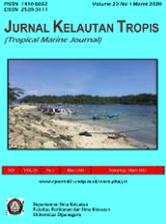
Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang dipublikasikan (buah)</i>		
- Target	2	4
- Realisasi	2	9
- Persentase (%)	100	225

Dari Tabel 14 terlihat bahwa hingga akhir Triwulan II tahun 2020, capaian KTI LRSDKP sebanyak 9 buah KTI yang telah terbit dari target 4 KTI, jadi untuk target KTI Triwulan II tahun 2020 telah **tercapai bahkan melebihi target di triwulan 2**.

Nilai Capaian IKU 6 pada Triwulan II tahun 2020 ini lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan I, yakni 225% pada triwulan 2 dan 100% pada triwulan I.

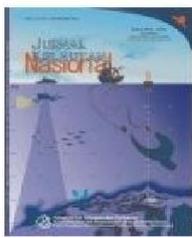
Daftar KTI LRSDKP yang telah terbit sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2020 terdapat pada table 14 sebagai berikut :

**Tabel 15.** Judul KTI LRSDKP yang telah terbit Triwulan II tahun 2020

No.	Penulis	Judul	KTI (Jenis, Volume, Penerbit, dan Kategori)	Foto (Sampul KTI)
1	Koko Ondara dan Ruzana Dhiauddin	Indonesia Marine Debris: Banda Aceh Coastal Environment Identification	Jurnal Kelautan Tropis Vol. 23 No. 1 (2020) 	
2	Guntur Adhi Rahmawan, Ulung Jantama Wisna, Wisnu Arya Gemilang, Ilham, Semeidi Husrin	Prediksi Akumulasi Sedimen Berdasarkan Survei Batimetri dan Hidrodinamika di Pesisir Teluk Mandeh, Kab. Pesisir Selatan, Sumbar	Jurnal Kelautan Tropis Vol. 23 No. 1 (2020)	
3	Wisnu Arya Gemilang, Ulung Jantama Wisna, Tubagus Solihuddin, Ali Arman, Koko Ondara	Sediment Accumulation Rate in Sayung Coast, Demak, Central Java Using Unsupported <sup>210</sup> Pb Isotope	Atom Indonesia Vol. 46 No. 1 (2020)	
4	Wisnu Arya Gemilang, Ulung Jantama Wisna, Ruzana Dhiauddin	Coastal Vulnerability Assessment of Tourism Area and Management Strategy for Sustainable Environmental Resilience: Case of Mandeh Coast, West Sumatra	Majalah Ilmiah Globe Vol. 22 No. 1 (2020)	
5	Koko Ondara dan Guntur Adhi Rahmawan	Pemantauan Sedimentasi Menggunakan Data Batimetri High Frequency Di Perairan Sayung, Demak- Jawa Tengah	Geomatika Vol. 26 No. 1 (2020) 	
6	Koko Ondara, Ruzana Dhiauddin, Ulung Jantama Wisna, dan Guntur Adhi Rahmawan	Hydrodynamics Features and Coastal Vulnerability of Sayung Sub-District, Demak, Central Java, Indonesia	Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology Vol. 5 No. 1 (2020)	

## LRSDKP

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir  
Pusat Riset Kelautan

7	Wisnu Arya Gemilang, Nia Naelul Hasanah Ridwan, Ulung Jantama Wisha, Guntur Adhi	Identifikasi Awal Potensi Tinggalan Budaya Bawah Laut Kalimantan Barat, Berdasarkan data Side Scan Sonar	Jurnal Kelautan Nasional Vol. 15 No. 1 (2020 )	
---	--	---	--	---

	Rahmawan			
8	Try Al Tanto, Tri Hartanto, Mulia Purba, Widodo . Pranowo	Karakteristik Massa Air di Perairan Barat Daya Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Jurnal Kelautan Nasional Vol. 15 No. 1 (2020 )	
9	Herdiana Mutmainah, Ilham, Try Al Tanto, Hadi, Rizki Anggoro Adi	Analisa Tumpahan Crude Palm Oil (CPO) di Teluk Bayur Sumatera Barat, 28 September 2017	Jurnal Kelautan Nasional Vol. 15 No. 1 (2020 )	

## SASARAN STRATEGIS2

### Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Nilai capaian sasaran strategis Tatakelola Pemerintahan yang Baik sebesar 142%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 5 (Lima) IKU yaitu :

### INDIKATOR KINERJA UTAMA 7

#### ***Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)***

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma.

#### DEFINISI

- Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari ASN
- Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

## FORMULASI

1. Kualifikasi (Bobot 25%)
2. Kompetensi (Bobot 40%)
3. Kinerja (Bobot 30%)
4. Disiplin (Bobot 5%)

*Tabel 16. Capaian IKU 7 LRSDKP Triwulan I tahun 2020*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)</i>		
- Target	-	-
- Realisasi	-	-
- Persentase (%)	-	-

Capaian IKU indeks kompetensi dan integritas LRSDKP pada Triwulan II tahun 2020 adalah sebesar 0% atau belum terealisasi.

Nilai capaian IKU 7 pada Triwulan II tahun 2020 masih sama jika dibandingkan dengan persentase capaian pada Triwulan I yakni kosong karena belum dilakukan pengukuran. IKU Indeks profesionalitas ASN lingkup Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks) baru dilakukan penghitungan pada akhir tahun anggaran.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 8

### ***Prosentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)***

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari, dimana menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Komponen penilaian implementasi manajemen pengetahuan terdiri dari 3 Variabel, yaitu:

1. Sharing dokumen, (bobot 20%)
2. Keikutsertaan Pejabat administratif s.d staf unit kerja (bobot 40%),
3. Keaktifan Pejabat administratif unit kerja (bobot 40%).

### FORMULA

$$\% \text{ MP} = (20\% \times \text{Upload dokumen}) + (40\% \times \text{Keikutsertaan}) + (40\% \times \text{Keaktifan})$$

#### Keterangan:

- Tingkat sharing dokumen : Persentase dokumen mandatory yang dibagikan melalui (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan Dokumen yang harus dibagikan diantaranya Renstra, Manual IKU, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Capaian Road Map RB
- Tingkat keikutsertaan : Persentase pejabat administratif dalam unit kerja yang tergabung dalam SI-MP dibanding total Pejabat administratif s.d Staff unit kerja.
- Tingkat keaktifan : Persentase pejabat administratif yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat administratif unit kerja.

Pada Triwulan II tahun 2020, nilai capaian IKU 7 adalah sebesar 100%. Yang berasal dari komponen :

1. Sharing dokumen, 20%
2. Keikutsertaan Pejabat administratif s.d staf unit kerja, nilai 40% didapatkan dari jumlah pejabat LRSDKP (Kepala Loka, Kasubsie TO, Kasumsie PT, Kaur Tata Usaha dan 2 Staff) yang ikut mendaftar dalam aplikasi Bitrix 24 Kinerja KKP
3. Keaktifan Pejabat administratif unit kerja, nilai 40% (keaktifan 4 orang pejabat eselon 4 dan eselon 5 dalam menyampaikan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh LRSDKP

**Tabel 17.** Capaian IKU 8 LRSDKP Triwulan II tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Prosentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar (%)</i>		
- Target	65	70
- Realisasi	70	100
- Persentase (%)	107	142,8

Persentase capaian IKU 8 pada Triwulan II tahun 2020 lebih baik atau lebih besar jika dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2020, yakni 100% pada triwulan II dan 70% pada triwulan I tahun 2020.

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 9

### ***Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LRSDKP***

IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran dan bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya, atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sesuai yang ditargetkan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus

**Tabel 18.** Capaian IKU 9 LRS DKP Triwulan II tahun 2020

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Nilai Kinerja Anggaran LRS DKP (%)</i>		
- Target	-	-
- Realisasi	-	-
- Persentase (%)	-	-

## FORMULASI

### 1. Revisi DIPA

- a. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap jumlah DIPA yang dikelola
- b. Jenis revisi yang menjadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi
- c. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut

### 2. Deviasi RPD ( Halaman III DIPA)

- a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA
- b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L

### 3. Pengelolaan UP

- a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP
- b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP

sekarang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan

- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

#### **4. Rekon LPj Bendahara**

- a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN
- b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara

#### **5. Data Kontrak**

- a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN
- b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak

#### **6. Penyelesaian Tagihan**

- a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja jabatan pengelola keuangan dengan mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan ke KPPN.

- b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non Belanja pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. Semakin tinggi % ketetapan waktu maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihan

## 7. Penyerapan anggaran

- a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah.
- b. Target penyerapan tahun 2020, yakni TW 1: 15% TW 2: 40% TW 3: 60% TW 4: 90%
- c. Kinerja penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik.

## 8. Return SP2D

- a. Indikator return SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data supplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur terhadap jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan.
- b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antara lain kesalahan rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif, dll
- c. Semakin rendah prosentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN.

## 9. Perencanaan Kas

- a. Indikator renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L khusus pada SPM yang wajib disampaikan Renkas/RPD sebelum pengajuan SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pengajuan SPM dibandingkan renkas/SPD yang diajukan.
- b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian.

## 10. Pengembalian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

## 11. Dispensasi Penyampaian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

## 12. Pagu Minus

- a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L
- b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan.
- c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut

IKU ini bertujuan Untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran Pusat Riset Kelautan dalam upaya mewujudkan peningkatan

pranata dan kelembagaan birokrasi Pusat Riset Kelautan yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada aplikasi online omspan Kementerian Keuangan (<http://spanint.kemenkeu.go.id>). Nilai kinerja tersebut berubah secara real time selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai output yang diisikan pada aplikasi om span tersebut. Capaian IKU 9 pada Triwulan II tahun 2020 sebesar 0% atau belum tercapai karena pengukuran dilakukan diakhir tahun anggaran.

Prosentase nilai kinerja anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2020 sama jika dibandingkan dengan prosentase capaian pada triwulan I tahun 2020 yakni kosong atau nol, karena belum dilakukan pengukuran, pengukuran ditargetkan pada akhir tahun anggaran 2020.

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA 10**

### ***Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2019***

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Setjen merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk IKU "Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Satker dibandingkan realisasi anggaran satker tahun 2019" menggunakan metode cascading dipersempit dengan target 1%, namun Satker tidak melakukan penilaian mandiri, melainkan dari hasil evaluasi penilaian dari Itjen dan Biro Keuangan yang akan diketahui pada akhir tahun berdasarkan hasil tindak lanjut Satker terhadap LHP BPK

aran pembangunan LRS DKP secara efisien dan ekuntabel	Sa
ersentase nilai temuan LHP BPK atas LK Pusat Riset Kelautan dibandingkan realisasi TA. 2018 (%)	Na

*Tabel 19. Capaian IKU 10 LRS DKP Triwulan II tahun 2020*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Batas Tertinggi Persentase Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan (LK) Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Dibandingkan Realisasi Anggaran Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir TA 2019</i>		
- Target	-	-
- Realisasi	-	-
- Persentase (%)	-	-

Capaian IKU 10 pada Triwulan II tahun 2020 masih kosong atau (0) belum dilakukan pengukuran dan sepanjang tahun 2019 tidak ada temuan BPK. Dan untuk IKU 10 ini yang melakukan penilaian dari Itjen bukan dari penilaian mandiri satker.

Prosentase capaian IKU 10 tahun 2020 triwulan II masih sama jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan I tahun 2020 yakni masih kosong atau (0).

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA 11**

### ***Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)***

IKU ini didefinisikan sebagai persentase pelaksanaan anggaran dibanding dengan alokasi anggaran dan bertujuan untuk menghasilkan output anggaran tertentu dengan input anggaran serendah-rendahnya, atau dengan input anggaran tertentu mampu menghasilkan output sesuai yang ditargetkan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

*Tabel 20. Capaian IKU 11 LRS DKP Triwulan II tahun 2020*

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
<i>Nilai Kinerja Anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (%)</i>		
- Target	Tidak ada IKU ini	-
- Realisasi	Tidak ada IKU ini	-
- Persentase (%)	-	-

Nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada aplikasi online Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART DJA) Kementerian Keuangan (<http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>). Nilai kinerja tersebut berubah secara real time selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai output yang diisikan pada aplikasi SMART DJA tersebut. Capaian IKU 11 pada Triwulan II tahun 2020 masih kosong atau belum dilakukan pengukuran. Nilai kinerja anggaran dipengaruhi oleh beberapa komponen sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran sebesar (%);
2. Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Awal sebesar (%);
3. Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Revisi sebesar (%);
4. Pencapaian Keluaran sebesar (%); dan
5. Efisiensi Anggaran sebesar (%).

Aspek yang mempengaruhi tinggi rendahnya serapan anggaran yaitu Penyerapan Anggaran, Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Awal, Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Revisi, Pencapaian Keluaran, dan Efisiensi Anggaran.

Capaian Kinerja IKU 11 sampai dengan akhir triwulan II masih kosong dan tidak bisa dibandingkan dengan capaian pada triwulan I karena pada triwulan I IKU ini belum ada.

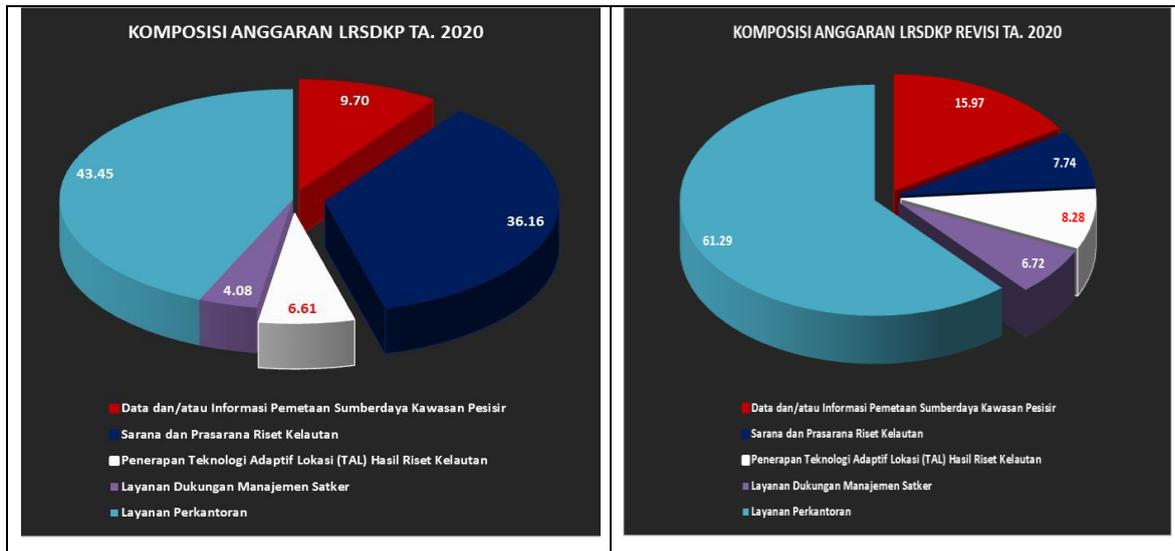
### **AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai IKU yang telah ditetapkan, LRS DKP menerima alokasi anggaran sebesar Rp. 11.338.610.000,- yang terbagi kedalam 5 jenis keluaran (output), yakni Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir Rp. 1.100.000.000,-, Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Rp. 4.100.000.000, Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan Rp.

750.000.000, Layanan Dukungan Manajemen Satker Rp 462.530.000,-, Layanan Perkantoran Rp 4.926.080.000,-, adapun proporsi anggarannya seperti pada gambar 9.

### **Capaian Realisasi Anggaran**

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir tahun 2020 memperoleh dana dari sumber anggaran APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pagu Anggaran LRSDKP yang ditetapkan pada awal tahun 2020 sebesar Rp. 11.338.610.000,- yang terbagi kedalam 5 jenis keluaran (output), yakni Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir Rp. 1.100.000.000,-, Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Rp. 4.100.000.000, Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan Rp. 750.000.000, Layanan Dukungan Manajemen Satker Rp 462.530.000,-, Layanan Perkantoran Rp 4.926.080.000,. Kemudian dilakukan revisi anggaran untuk penanggulangan pandemi covid-19 pada awal bulan April sehingga mengalami pengurangan pada beberapa output kegiatan diantaranya Sarana dan Prasarana Riset Kelautan yang awalnya Rp. 4.100.000.000, menjadi Rp. 533.000.000,- Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan awalnya Rp. 750.000.000,- menjadi Rp. 570.000.000,- Layanan Perkantoran awalnya Rp 4.926.080.000,- menjadi Rp. 4.221060.000,-. Dari pagu anggaran Rp. 11.338.610.000,- turun menjadi Rp. 6.886.590.000,-. Dengan rincian output sebagai berikut: Kegiatan Kawasan Pesisir Yang Terpetakan Sumberdayanya (Riset) Rp. 1.100.000.000,- Sarana dan Prasarana Riset Kelautan Rp. 533.000.000,-, Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan Rp. 570.000.000,- Layanan Dukungan Manajemen Satker Rp 462.530.000,- Layanan Perkantoran Rp 4.221060.000,-. Komposisi anggaran LRSDKP tahun 2020 awal dan Revisi adalah sebagai berikut:

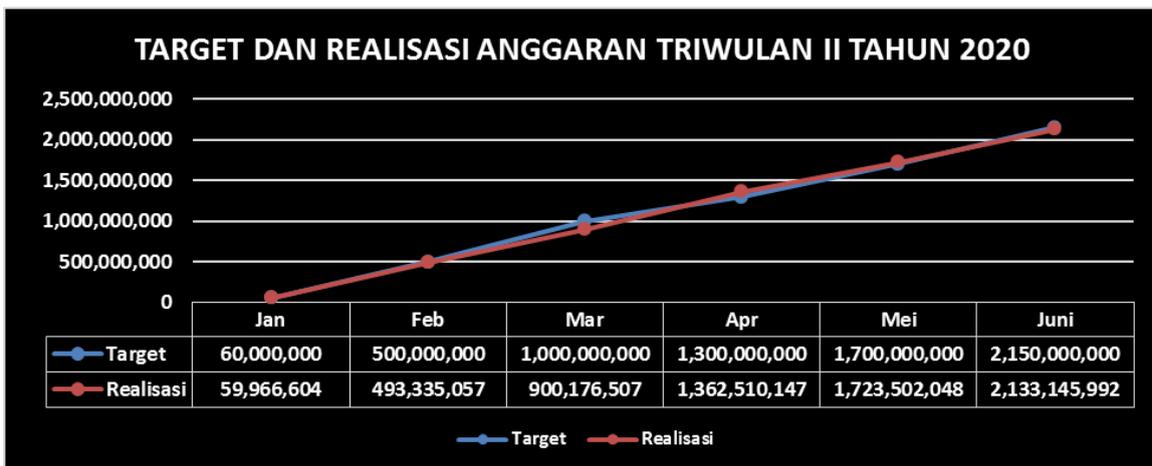


*Gambar 9.* Komposisi Anggaran DIPA T.A 2020 awal dan Dipa Revisi

Realisasi anggaran sampai dengan akhir Triwulan II tahun 2020 terdapat pada Tabel 20 berikut:

*Tabel 21.* Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan II tahun 2020

No	Pagu	Realisasi	%	Saldo	%	Keterangan
1	6.886.590.000,-	2.133.145.992,-	30,9	4.753.444.008,-	69,1	



*Gambar 10.* Perbandingan target dan realisasi keuangan LRSDKP Triwulan II tahun 2020

Dari pagu anggaran Triwulan II tahun 2020, telah terealisasi sebesar Rp. 2.133,145,992,- (30,98%) dari target sebesar Rp. 2.150.000.000,- (31,43%), terdapat selisih realisasi dengan target lebih besar daripada Realisasi.

Perbandingan realisasi anggaran LRSDKP triwulan I dan Triwulan II adalah sebagai berikut :

**Tabel 22.** Perbandingan Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan I dan II tahun 2020

Anggaran tahun 2020	Triwulan I tahun 2020	Triwulan II tahun 2020
- Realisasi	90.076.507	1.232.969.485
- Persentase (%)	13,07	17,93

Dari data tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi anggaran LRSDKP pada triwulan II lebih besar daripada realisasi triwulan I hal ini membuktikan walaupun dalam masa pandemi Covid 19 tetapi produktivitas kantor LRSDKP masih lumayan bagus.

Dari data DIPA per bidang/kegiatan terlihat bahwa pada anggaran Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya (Riset) terealisasi sebesar 5,7%, sarana dan prasarana sebesar 44,31, Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan 2,86, Layanan Dukungan Manajemen Satker 30,5, dan Layanan Perkantoran 42,49.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di LRSDKP hingga bulan juni 2020 masih kosong (0), Rencana Realisasi PNBP berasal dari PNBP fungsional berupa jasa sewa alat Riset dan PNBP umum berupa pengembalian Tunjangan Kinerja dan juga persewaan Guest House, tetapi karena masa pandemi covid 19 rencana penerimaan PNBP LRSDKP belum bisa berjalan

### 3.4.2. Perkembangan Realisasi Anggaran Per Belanja

Penyelenggaraan kegiatan berdasarkan jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sampai dengan triwulan II tahun 2020 (berdasarkan aplikasi SAS per juni 2020), LRSDKP dapat dilihat dalam Tabel 35 berikut ini :

**Tabel 23.** Realisasi berdasarkan jenis belanja satker LRSDKP Triwulan II tahun 2020

Jenis Belanja	Pagu	realisasi	%	sisanya	%
Belanja Pegawai	1.969.027.000	853.575.495	43,35	1.115.451.505	56,65
Belanja Barang	4.384.563.000	1,043,369,997	23,79	3.341.193.112	76,31
Belanja Modal	533.000.000	236.200.500	44,31	296.799.500	55,69
<b>Total</b>	<b>6.886.590.000</b>	<b>2.133.145.992</b>	<b>30,97</b>	<b>4.753.444.008</b>	<b>69,03</b>

### 3.5.3. Perkembangan Realisasi Keuangan Setiap Satker Per Sumber Dana

Perkembangan realisasi per sumber dana dari LRSDKP, total anggaran pagu tahun 2020 sebesar Rp 6.886.590.000,- dengan realisasi keuangan pada akhir triwulan II tahun 2020 (berdasarkan aplikasi OMSPAN per tanggal 30 juni 2020) adalah belanja pegawai 43,35 %, belanja barang 23,79%, dan belanja Modal 44,31%. Dari realisasi total tersebut semua dari dana rupiah murni sebesar 30,97%, Perkembangan realisasi keuangan pada triwulan II tahun 2020 persumber dana dapat dilihat pada Tabel 36 berikut :

**Tabel 24,** Perkembangan realisasi keuangan LRSDKP Triwulan II Tahun 2020 per sumber dana

Jenis Belanja	RM		
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
<b>Pagu</b>	1.969.027.000	4.384.563.000	533.000.000
<b>Realisasi</b>	<b>853.575.495</b>	<b>1,043,369,997</b>	<b>236.200.500</b>
<b>%</b>	43,35	23,79	44,31
<b>Total Pagu</b>	6.886.590.000		
<b>Total Realisasi</b>	<b>2.133.145.992 (30,97%)</b>		

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa penyerapan hingga bulan juni Tahun 2020 berdasarkan sumber dana aplikasi OMSPAN per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

- Realisasi Rupiah Murni (RM) sampai bulan juni pada belanja pegawai sebesar Rp. **853.575.495** (43,35%) dari Pagu Rp. 1.969.027.000,- belanja barang



terrealisasi sebesar Rp. **1,043,369,997** (23,79%) dari Pagu Rp. 4.384.563.000; dan belanja Modal terealisasi sebesar Rp. **236.200.500** (44,31%) dari Pagu Rp. 533.000.000. semua sumber dana LRSDKP baik itu gaji pegawai, belanja barang dan belanja modal adalah dari Rupiah Murni.

- Anggaran terkait pemanfaatan PNBP belum ada pada DIPA, hal ini dikarenakan PP yang mengatur tentang pemanfaatan PNBP lingkup BRSDM KP hingga saat ini masih belum ada.
- Hibah Luar Negeri (HLN) sampai dengan bulan juni 2020 ini di LRSDKP belum ada.

## IV. PENUTUP

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Output volume			Status	Progres Fisik			Status
			T	R	%		T	R	%	
1	Hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dimanfaatkan	1	Data, informasi dan peta hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang digunakan dalam penyusunan kebijakan (Paket)	-	-	-				
		2	Desa mitra/kawasan mitra yang menerapkan teknologi adaptif lokasi (Desa/Kawasan)	-	-	-				
		3	Teknologi Adaptif Lokasi Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dihasilkan (Paket)	-	-	-				
		4	Unit kerja Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang ditingkatkan sarana dan prasarannya (Lokasi)	1	1	100		100	100	100
		5	Jejaringdan/atau kerja sama Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang disepakatidan ditindaklanjuti (Dokumen)	-	-	-				
		6	Jumlah Karya Tulis Ilmiah hasil Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang dipublikasikan (Dokumen)	4	9	225		100	225	225
2	Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan	7	Indeks profesionalita ASN Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Indeks)	-	-	-				
		8	Persentase unit kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yg terstandar (%)	70	100	142		100	142	142
		9	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Nilai)	-	-	-				
		10	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK LRSDKP dibandingkan realisasi anggaran LRSDKP TA. 2019	-	-	-				
		11	Nilai Kinerja Anggaran LRSDKP (%)	-	-	-				

#### 4.1. KESIMPULAN

Dari hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja LRSDKP Triwulan II tahun 2020 dapat diambil kesimpulan bahwa dengan metode pengukuran *Eksternal* menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di *website* [kinerjaku.kkp.go.id](http://kinerjaku.kkp.go.id), Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berhasil mencapai target kinerja Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,50% dengan status baik. berasal dari capaian kinerja masing-masing level dibawahnya adalah sebagai berikut :

- a. Level Tata Usaha, capaian kinerja sebesar 103,13%;
- b. Tata Operasional, capaian kinerja sebesar 106,25%;
- c. Pelayanan Teknis, capaian kinerja sebesar 115.94%.

#### 4.2 PERMASALAHAN

Permasalahan atau kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran IKU 8 Nilai Kinerja Pelaksanaan anggaran LRSDKP mengacu kepada monev PA yang ada di aplikasi omspan kementerian keuangan, monev PA nilainya terus berubah jika dilihat pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya, monev PA nilainya berhenti pada pertengahan bulan berikutnya sedangkan pengisian aplikasi kinerjaku dan juga pelaporan LKJ harus diawal bulan sehingga data yang didapat pada monev PA untuk mengisi capaian pada aplikasi kinerjaku dan juga pada laporan LKJ masih data sementara.